

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring, yaitu *Zoom* di Bidang Pemerintahan khususnya pada bagian kefarmasian dan perbekalan kesehatan, maka dapat disimpulkan:

1. Apoteker memiliki lingkup kerja terstruktur pada ranah pemerintahan melalui Dinas Kesehatan Tingkat Kota/Kabupaten hingga Kementerian Kesehatan secara nasional terutama pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan seputar kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
2. Program kebijakan kerja unggulan dari Apoteker dalam Dinas Kesehatan Sub Bidang Kefarmasian, Makanan dan Minuman terdiri atas Program Tata Kelola Obat Publik (OBLIK), Program Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional (POR), Program Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Program Obat Tradisional, Program Kosmetika dan Program Makanan dan Minuman.
3. Program kebijakan kerja unggulan dari Apoteker dalam Dinas Kesehatan Sub Bidang Sarana dan Alat kesehatan terdiri dari Program Pembinaan dan Pengendalian Tata Kelola, Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga.
4. Apoteker yang bekerja di Bidang Pemerintahan terutama Dinas Kesehatan memiliki peranan penting mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup sehat dan meleak akan informasi

seputar obat, penyakit maupun pencegahannya melalui regulasi yang dibuat maupun program kerja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring, yaitu *Zoom* di Bidang Pemerintahan khususnya pada bagian kefarmasian dan perbekalan kesehatan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya program untuk melibatkan pelajar hingga mahasiswa (generasi muda) sebagai agen kesehatan atau apoteker cilik bagi diri, sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun melalui media lainnya.
2. Pembuatan aplikasi Dinkes *mobile* yang dapat memuat informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan serta menjadi wadah bagi masyarakat selain pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan permasalahan riil seputar kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alat Mesin Pertanian dan Agroindustri Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, 2019, 'Proses Pembuatan Tahu', diakses pada 16 Mei 2022, <https://alsintan.tp.ugm.ac.id/2019/09/12/proses-pembuatan-tahu/>
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2012, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI, 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI, 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut pengawasan Obat dan Bahan Obat*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2022, Visi dan Misi Dinkes Jatim, Diakses pada 14 Mei 2022, [https://dinkes.jatimprov.go.id/index.php?r=site/berita\\_detail&id=1](https://dinkes.jatimprov.go.id/index.php?r=site/berita_detail&id=1)
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI, 2020, Pedoman Pelaksanaan Program Gema Cermat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Gubernur Jawa Timur, 2016, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Modul Penggunaan Obat Rasional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Teknis Penemuan dan Tata Laksana Hipertensi*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *SIPNAP User Manual untuk Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Republik Indonesia*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Cara*

*Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Naroktika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah, 1999, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah, 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta.